

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian	a. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
3	Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
4	Proses pemberhentian PNS	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
5	Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
6	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulensi hasil rapat Baperjakat	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	pengungkapan secara premateur		
7	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun
8	Data rencana penempatan CPNS/PNS	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
9	Dokumen Dan Formulir Isian Pegawai	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah Korupsi Kolusi Nepotisme	1 Tahun
10	Biodata Elektronik PNS (Database) tahun kemarin data ASN dan Non ASN	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pelindungan Data Pribadi			
11	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan: 1) Pimpinan Tertinggi 2) Administrator 3) Pengawas	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
12	Data Presensi PNS	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
13	Data LRA Medis Pasien (Berisi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan pengobatan)	a. Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Pasal 351 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	1. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1 Tahun
14	Data Tenaga Kesehatan yang Bersifat Pribadi (Riwayat kesehatan tenaga medis, data pribadi, dll)	a. Pasal 65 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; b. Pasal 351 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	1. Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia; 2. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang	1. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2. Menghindari penyalahgunaan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			dapat mengganggu penyelenggaraa n pelayanan kesehatan.	penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	
15	Hasil Diagnosis Penyakit Tertentu (HIV/AIDS, gangguan jiwa, penyakit menular tertentu)	a. Pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	1. Mengungkap data pribadi tenaga kesehatan dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaa n penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraa n pelayanan kesehatan.	1. Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia; 2. Menghindari diskriminasi dan stigma sosial.	1 Tahun
16	Data Audit, Investigasi, atau Kasus Hukum di Bidang Kesehatan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisiko melanggar hak privasi pasien dan kerahasiaan medis	Menjaga objektivitas dan proses audit/ investigasi/ hukum.	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
17	Identitas Pelaku Kelalaian (nakes, badan usaha) tanpa persetujuan Pelaku Kelalaian (Nama, alamat, NIK, KTP, Jenis Kelalaian)	a. Pasal 65 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mempermalukan atau memprovokasi publik, menyebabk an intimidasi, pelecehan, doxing, atau gangguan terhadap orang tersebut maupun keluarganya.	1. Melindungi data pelaku yang bersifat rahasia; 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi	1 Tahun
18	Surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada Kepala Desa yang memuat identitas pribadi, uraian pelanggaran, hasil pemeriksaan, serta pertimbangan penjatuhan sanksi	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melanggar perlindungan data pribadi, disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu	Melindungi data pribadi yang bersangkutan, mencegah penyalahgunaan informasi	1 Tahun
19	Surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada Perangkat Desa yang memuat identitas pribadi, uraian pelanggaran, hasil pemeriksaan, serta pertimbangan penjatuhan sanksi	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Melanggar perlindungan data pribadi, disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk	Melindungi data pribadi yang bersangkutan, mencegah penyalahgunaan informasi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik	kepentingan tertentu		
20	Data pribadi yang memuat NIK Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang tercantum dalam dokumen administrasi pemerintahan desa yang dikelola oleh dinas	a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melanggar perlindungan data pribadi, risiko kejahatan berbasis data pribadi	Menjaga keamanan dan perlindungan Administrasi	1 Tahun
21	Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan), dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan)	a. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dan menghambat proses pengawasan	Melindungi dan meminimalkan penyalahgunaan dokumen negara serta menjaga objektivitas dan kemandirian APIP dalam pelaksanaan pengawasan, sekaligus membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		d. Pasal 4060 Peraturan Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor PER-1/AAIPI/DPN/2024 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia			
22	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pengawasan (TLHP)	a. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; d. Pasal 4060 Peraturan Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor PER-1/AAIPI/DPN/2024 tentang Standar Audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, mengganggu proses administrasi dan penegakan kebijakan internal, serta menghambat proses perbaikan birokrasi yang berdampak pada menurunnya efektivitas kebijakan pemerintah daerah	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara internal	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Intern Pemerintah Indonesia			
23	Dokumen /Identitas Pelapor Aduan Masyarakat melalui Media Elektronik dan Non Elektronik yang dikelola Inspektorat	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Mengancam keamanan fisik/psikis pelapor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal aduan	Memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan	1 Tahun
24	Surat-surat yang Dikategorikan Bersifat Rahasia (Surat Klarifikasi dan Permintaan Keterangan, Pemeriksaan Kasus/Investigatif, Surat Terkait Proses Administrasi Perkara)	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses pengambilan keputusan dan mengganggu kebijakan strategis pimpinan daerah	Menghindari intervensi pihak luar dalam proses perumusan kebijakan internal yang masih bersifat draft	1 Tahun
25	Rekam Medis	a. Pasal 17 Huruf h angka 2 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor	1) Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;	1) Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; d. Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2 008 tentang Rekam Medis	2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	
26	Data Hutang Pasien Kepada Rumah Sakit	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
27	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai kepada direksi RSUD Kabupaten Temanggung : 1) Substansi aduan yang dikirimkan melalui platform : Whatsapp Pengaduan, Google Form Kritik Saran, Kotak Saran, maupun Email 2) Identitas pribadi Pelapor dan Terlapor	a. Pasal 17 Huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	1)Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia 2)Melanggar asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulkan sanksi sosial sepihak sebelum putusan etik/hukum tetap	1)Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; 2)Perlindungan asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulkan sanksi sosial sepihak sebelum putusan etik/hukum tetap	1 Tahun
28	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang (Partai PKI)	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Th 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap rahasia pribadi;	Mengungkap rahasia pribadi;	1 Tahun
29	Data Data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/ Negara	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;	Membahayakan Pemerintahan/ Negara	Melindungi Data Pemerintah/Negara	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang KOMINDA (Komunitas Intelegen Daerah)			
30	Data Keberadaan Orang Asing di Kabupaten Temanggung	a. Pasal 17 Huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Permendagri No 50 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah	Berpotensi Menimbulkan tindakan Kriminal yang dapat mengancam keberadaannya	Keberadaan Orang asing menjadi terlindungi	1 Tahun
31	Data Pribadi (NIK, Nama, Alamat, Tempat tanggal lahir, biometric, data - data pencatatan sipil)	a. Pasal 79 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah, Penyalahgunaan dan manipulasi data	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah, penyalahgunaan dan manipulasi data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
32	Data pribadi tenaga kerja asing	a. Pasal 7, Pasal 71 huruf a, Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	1 Tahun
33	Data pribadi Pekerja / Buruh	a. Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2	Mengungkap data pribadi pekerja / buruh yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pekerja/ buruh yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang c. Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
34	Data pribadi perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan, neraca dan aset	a. Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	1 Tahun
35	Data Gaji, Rekening Tabungan, Pinjaman Pegawai	c. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Informasi yang bersifat pribadi dapat terlindungi,	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik d. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang	menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	
36	Data wajib pajak Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang	menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun
37	Database Obyek Pajak dan Retribusi	a. Pasal 17 Huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi	1 Tahun
38	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Kabupaten Temanggung	
39	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
40	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	laporan tersebut belum diaudit		
41	Aset dan Inventaris (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
42	Neraca (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	laporan tersebut belum diaudit		
43	Biodata Anggota Perpustakaan yang memuat Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon, Alamat elektronik	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi	1 Tahun
44	Dokumen/ arsip yang bersifat rahasia dengan kode sangat rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T)	a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Kerahasiaan dan perlindungan data Negara	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kabupaten Temanggung			
45	Proses dan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda PPNS dan Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	a. Pasal 17 Huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Kelancaran Proses Penegakan Hukum	1 Tahun
46	Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	c. Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat Proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran Proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
47	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan,aset dan design produksi	Pasal 17 Huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun
48	Data permohonan izin yang belum selesai diproses	Pasal 17 Huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan mengganggu proses perizinan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun
49	Dokumen / Identitas Pelapor Aduan Masyarakat melalui Media Elektronik dan Non Elektronik yang dikelola DPMPTSP	a. Pasal 17 Huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 5 ayat (1) huruf h Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Mengancam keamanan fisik/psikis pelapor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal aduan	Memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan	
50	Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban, serta anak berhadapan dengan hukum	a. Pasal 17 Huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	Perlindungan Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; d. Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; e. Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			
51	Laporan Pendapatan Objek Pariwisata	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 21 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; c. Pasal 7 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025 tentang Satu Data Bidang Pariwisata;	d. Risiko pelanggaran kerahasiaan usaha e. Potensi persaingan tidak sehat f. kesalahpahaman publik g. Risiko penyalahgunaan data h. Menimbulkan tekanan sosial dan politik	i. Melindungi kerahasiaan bisnis j. Menjaga keamanan data sensitif k. Mencegah salah tafsir	1 Tahun
52	Data Pribadi Kelompok Kesenian (NIK, Nama, Nomor, Telephone)	a. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah, penyalahgunaan dan Manipulasi Data	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah, penyalahgunaan dan Manipulasi Data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
53	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
54	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
55	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
56	Buku Assesment infrastruktur jaringan internet	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	c.	1 Tahun
57	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Tindakan perusahaan	Melindungi/meng aman kan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	pengrusakan, pencurian data	perangkat serta data	
58	Data aplikasi sebagai berikut: 1) OS Server yang digunakan 2) Database 3) User dan password 4) Manual pengembangan web 5) Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan 6) Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
59	Data Pengguna Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi Otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
60	Data Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Temanggung	a. Pasal 16, ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, b. Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	1 Tahun
61	Data Pribadi Orang Yang Terjaring Razia (Pelanggar), data pelapor dan atau pengadu	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. c. Undang – Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengancam keamanan fisik/psikis pelapor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal aduan	Memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan	1 tahun
62	Strategi dan Taktik Operasional	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya pada Pasal 255) yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan	Strategi dan taktik penindakan terbaca, mengganggu keberhasilan operasional	Menjaga kerahasiaan strategi pengawasan dan penindakan sehingga sasaran	1 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja		tidak mengetahui rencana operasi. Melindungi identitas pelapor, petugas, dan pihak terkait. Mencegah manipulasi atau penghilangan bukti sebelum penindakan dilakukan. Menjaga efektivitas operasi lapangan karena informasi sensitif hanya diketahui pihak yang berwenang.	
63	Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD yang dinyatakan tertutup	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan	Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia untuk menjaga situasi tetap kondusif	1 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD			

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TRI WINARNO